

**PENGEMBANGAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF UNTUK  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL NELAYAN TRADISIONAL  
DI DESA ARUNGKEKE KECAMATAN ARUNGKEKE**

*Tateki Yoga Tursilarini\**

*ABSTRACT*

*It is so ironic to know that Indonesia as a maritime nation with its area of 5.8 km squares and abundant sea resources, but in reality most fishermen live in poverty and experience limits either in economic, social, or in politic. Eradicating poverty gives the emphasis on the participation of the entire society including the poor society in order to help them selves being free from the poverty. The research is done purposively in Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. The research population is taken from the 30 traditional fishermen who are head of family and several informants from related institutions, public figures, and social organizations which are concerned on fishermen. The data are taken by conducting interview and equipped with document study. The data analysis is done in two approaches i.e. qualitative description and product moment analysis.*

*The research results that the fishermen pape'kang and parawe' have participated in improving alternatif occupation by cultivating seaweed. The traditional fishermen participation in the effort of developing alternatif occupation positively correlates to the improvement of traditional fishermen welfare.*

*It is recommended that the alternatif occupation development in improving the traditional fishermen social welfare does not fully draw the fishermen from the fishery and nautical field. Then, it needs further development on skill and competence in the field of fishery and seaweed covering from the methods and cultivation managerial strategies so that the products can compete with the others. Also, the support and policy consistency of the Local Government are highly needed to develop the coastal area in Kecamatan Arungkeke. Last, related institutions as well as Social Organizations in the local area are to interlink partnership in the effort of helping fishermen community to be free from poverty.*

**Keywords:** *alternatif occupation, social welfare, traditional fishermen*

*ABSTRAK*

*Indonesia merupakan negara maritim dengan luas mencapai 5,8 kilometer persegi dan memiliki sumber daya kelautan yang sangat melimpah, namun sangatlah ironis untuk mengetahui bahwa pada kenyataannya kebanyakan nelayan Indonesia hidup dalam kemiskinan*

---

\* **Tateki Yoga Tursilarini**, adalah Peneliti Muda pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Yogyakarta.

dan mengalami banyak keterbatasan baik dalam bidang ekonomi, sosial, atau dalam bidang politik. Upaya menghapuskan kemiskinan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat termasuk masyarakat miskin untuk membantu diri mereka sendiri lepas dari jeratan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Janeponto. Populasi dalam penelitian ini diambil dari 30 nelayan tradisional yang juga merupakan kepala keluarga dan beberapa informan dari institusi-institusi yang terkait, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang perikanan dan nelayan. Analisis data dilakukan dalam dua pendekatan yaitu deskripsi kualitatif dan analisis produk waktu.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pape'kang dan parawe' para nelayan ikut berperan serta dalam memberikan mata pencaharian tambahan bagi para nelayan dengan membudidayakan rumput laut. Partisipasi nelayan tradisional dalam usaha menyediakan mata pencaharian tambahan secara positif berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Namun sangat direkomendasikan agar penyediaan mata pencaharian tambahan bagi para nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para nelayan agar tidak mengalihkan perhatian para nelayan dari mata pencaharian utama mereka yaitu perikanan. Selain itu diperlukan juga peningkatan kemampuan dan kompetensi dalam bidang perikanan dan rumput laut yang mencakup metode dan strategi pengaturan pembudidayaan sehingga prouk yang mereka hasilkan dapat bersaing dengan produsen lain. Selain itu, dukunagn dan kebijakan yang sesuai dari Pemerintah Daerah juga diperlukan untuk membangun kawasan pesisir yang terdapat di Kecamatan Arungkeke. Terakhir, juga diperlukan kerjasama dari institusi-institusi yang terkait termasuk di dalamnya Organisasi Sosial lokal untuk bersama-sama membantu dalam upaya membebaskan komunitas nelayan dari kemiskinan.

*Kata-kata kunci: mata pencaharian tambahan, kesejahteraan sosial, nelayan tradisional.*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam pembahasan tentang kelautan dan perikanan, Indonesia merupakan negara yang senantiasa menjadi perhatian dunia. Hal ini paling tidak disebabkan oleh tiga hal, yaitu : 1. Bahwa keberanian dan ketangguhan pelaut-pelaut Indonesia sudah sejak lama dikenal di berbagai belahan bumi, bahkan di beberapa wilayah tertentu seolah telah menjadi legenda ; 2. Indonesia memiliki wilayah perairan seluas ± 5,8 juta km<sup>2</sup>, dan ; 3. Indonesia memiliki potensi sumber daya dan produksi ikan yang sangat besar dan merupakan negara penghasil ikan nomor lima terbesar di dunia setelah Cina, Peru, Chili dan Amerika Serikat.

Ironisnya adalah di negeri yang luas lautnya sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>, dengan potensi sumber daya laut yang berlimpah ruah seperti, ikan, kepiting, udang, kerang-kerangan dan berbagai

sumber daya laut lainnya yang siap untuk dieksploitasi oleh para nelayan, tetapi kenyataannya sebagian besar nelayan masih hidup miskin dalam berbagai keterbatasan, baik ekonomi, sosial, politik maupun pendidikan.

Beberapa hasil penelitian tentang kemiskinan yang menemukan bahwa di antara kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan tradisional merupakan kelompok yang paling miskin serta merupakan kelompok sosial terbesar dalam populasi masyarakat nelayan di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan nelayan tradisional kepada keadaan alam. Artinya, dalam melaksanakan kegiatan usahanya nelayan tradisional sangat tergantung pada kondisi alam. Apabila cuaca buruk, maka aktivitas bekerja nelayan tradisional akan mengalami hambatan. Keadaan tersebut terjadi bersamaan dengan

rendahnya kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan nelayan tradisional untuk melakukan pekerjaan ekonomis produktif di luar kegiatan mencari ikan.

Menurut data DKP dan BPN (2009), 37.09 % penduduk Indonesia adalah penduduk miskin, 66 % di antaranya merupakan penduduk pedesaan termasuk di dalamnya nelayan, masyarakat pesisir, dan pembudidaya perikanan. Dari keseluruhan penduduk miskin di pedesaan, ternyata 90 % di antaranya bekerja tetapi tetap miskin karena mereka tidak mempunyai akses yang nyata terhadap sumber-sumber ekonomi, tanah, modal dan teknologi.

Sejumlah konsep pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli pada dasarnya memberi penekanan pada partisipasi seluruh masyarakat dalam kegiatan pengentasan kemiskinan, termasuk di dalamnya partisipasi dari rakyat miskin itu sendiri. Artinya, bahwa setiap program atau kegiatan pengentasan kemiskinan harus melibatkan seluruh masyarakat dan rakyat miskin itu sendiri. Program pengentasan kemiskinan harus bersifat partisipatif, dalam arti membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat miskin untuk membantu dirinya sendiri keluar dari keadaan kemiskinan yang dialami.

Belajar dari pengalaman masa lalu di era tahun 70-an, pada saat dicanangkan kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap yang lebih dikenal dengan istilah revolusi biru (*blue revolution*), maka strategi pemberdayaan nelayan miskin perlu ditinjau kembali. Di satu sisi kebijakan motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap telah menyebabkan meningkatnya produksi perikanan, tetapi di sisi lain kebijakan revolusi biru telah pula meningkatkan kemiskinan nelayan tradisional karena kalah bersaing dengan nelayan bermodal, serta meningkatnya kerusakan lingkungan karena eksploitasi sumber daya laut yang tidak beraturan.

Pada tahun 1980-1996 kebijakan ini diperbaharui lagi dengan diluncurkannya deregulasi perikanan yang mencakup pengembangan alat tangkap, pembangunan pelabuhan dan penambahan armada penangkapan ikan melalui kemampuan produksi dalam negeri maupun impor kapal bekas serta pemberian izin kapal asing. Dalam perkembangan revolusi biru, pemerintah tidak hanya mengintervensi nelayan melalui modernisasi perikanan, tetapi juga mengeluarkan berbagai regulasi hukum, misalnya Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 yang melarang pengoperasian *jaring trawl* (pukat harimau), pembuatan Undang-Undang Perikanan tahun 1995 dan sebagainya.

Dalam kenyataannya kebijakan revolusi biru serta berbagai regulasi hukum yang dikeluarkan pemerintah belum sepenuhnya menunjukkan signifikansi yang nyata dalam kehidupan masyarakat nelayan khususnya nelayan *grassroot* sebagai *common people*. Sebagian besar nelayan tradisional di Indonesia sampai saat ini masih hidup dalam situasi sosial dan ekonomi di bawah standar (taraf hidup yang subsisten dan situasi sosial yang tertinggal) dan cenderung tereksplorasi. (<http://www.scribd.com/doc/14684717/Modernisasi-Perikanan>, diakses 16/10/2010).

Saat ini selayaknyalah dipikirkan strategi-strategi lain untuk meningkatkan kesejahteraan sosial nelayan tradisional. Strategi diversifikasi, yaitu peluasan alternatif pilihan mata pencaharian yang dilakukan oleh nelayan tradisional, baik di bidang perikanan maupun non perikanan, tampaknya lebih sesuai untuk memberdayakan nelayan tradisional. Strategi diversifikasi dilaksanakan dengan mengupayakan penganeekaragaman jenis mata pencaharian dan menciptakan mata pencaharian alternatif.

Mengacu pada konsep pengentasan kemiskinan tersebut di atas, dan realitas kekurangberhasilan sejumlah program pemberdayaan nelayan tradisional, maka

penelitian tentang pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial nelayan tradisional cukup relevan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat sejumlah isu yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan masalah penelitian, antara lain: 1. Nelayan tradisional pada umumnya adalah nelayan miskin yang berdiam di pesisir pantai yang sebagian besar merupakan kawasan tangkap lebih (*overfishing*); 2. Strategi pemberdayaan nelayan dengan model intensifikasi untuk meningkatkan produksi perikanan tidak sesuai dengan nelayan tradisional yang pada umumnya memiliki keterbatasan sosial, ekonomi, politik, maupun pendidikan.

Permasalahan yang kemudian perlu dicarikan jawabannya dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana perkembangan mata pencaharian alternatif di lokasi penelitian; 2. Bagaimanakah partisipasi nelayan tradisional dalam pengembangan mata pencaharian alternatif; 3. Apakah pengembangan mata pencaharian alternatif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan sosial nelayan tradisional. Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai antara lain 1. Mengetahui perkembangan mata pencaharian alternatif; 2. Mengetahui partisipasi nelayan tradisional dalam pengembangan mata pencaharian alternatif; 3. Mengetahui pengembangan mata pencaharian alternatif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan sosial nelayan tradisional.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian tentang pengembangan mata pencaharian alternatif dan peningkatan kesejahteraan sosial nelayan tradisional dapat pula dikategorikan sebagai suatu kebijakan, karena pengembangan mata pencaharian alternatif dan peningkatan kesejahteraan sosial nelayan tradisional merupakan suatu kebijakan

pemerintah. Menurut Thomas Dye dalam Abidin (2004), kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government choose to do or not to do*). Secara umum, kebijakan dapat dibedakan dalam tingkatan, yaitu : 1. Kebijakan umum yang mengambil Undang-Undang atau Keputusan Presiden; 2. Kebijakan pelaksanaan merupakan penjabaran kebijaksanaan umum berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah; 3. Kebijakan teknis yang merupakan kebijakan operasional, berada di bawah kebijakan pelaksanaan, mengambil bentuk berupa petunjuk teknis dan petunjuk operasional.

Pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA) merupakan kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan, sedangkan peningkatan kesejahteraan sosial nelayan tradisional merupakan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan pengembangan mata pencaharian alternatif merupakan penjabaran isi Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sedangkan kebijakan pengentasan kemiskinan merupakan penjabaran isi Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, "Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya".

Pengembangan MPA sebagai suatu kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha di kalangan nelayan tradisional, hanya akan berhasil apabila didukung oleh partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Pretty (1995) mengemukakan, partisipasi dapat dibagi dalam tujuh tipe, yaitu: *manipulative participation, passive participation, participation by consultation, participation for material incentives, functional*

*participation, interactive participation, dan self-mobilization.* Dalam kaitannya dengan pengembangan mata pencaharian alternatif, tipe partisipasi yang diharapkan adalah *self-mobilization* (partisipasi mandiri), di mana masyarakat berpartisipasi dengan jalan mengambil inisiatif secara independen untuk mengubah sistem.

Nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang sederhana. Ciri-ciri usaha nelayan tradisional adalah 1) Teknologi penangkapan yang digunakan bersifat sederhana dengan ukuran perahu yang kecil, daya jelajah terbatas, daya muat perahu sedikit, daya jangkauan alat tangkap terbatas, dan perahu dilajukan dengan layar, dayung, atau mesin ber-PK kecil; 2) Besaran modal usaha terbatas; 3) Jumlah anggota organisasi penangkapan kecil antara 2-3 orang, dengan pembagian peran bersifat kolektif (nonspesifik) dan umumnya berbasis kerabat, tetangga dekat, dan atau teman dekat; 4) Orientasi ekonomisnya terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. (Kusnadi, 2008 : 85-86).

Kemiskinan sering dikaitkan dengan sifat kekurangan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat digolongkan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan struktural. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (Avenroza, dkk, 2007:6).

Mengenai kemiskinan nelayan tradisional, dapat digambarkan bahwa kehidupan nelayan tradisional dan buruh nelayan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, karena sedikit guncangan atau kebutuhan mendadak, mereka akan *collapse*. Faktor penyebabnya adalah karena akumulasi faktor yang sangat kompleks, mulai dari kungkungan alam dan irama musim yang sulit ditebak, ketinggalan teknologi, kekurangan modal, tingkat pendidikan yang rendah, penghisapan dan posisi tawar-menawar yang lemah (Suyanto, 1996:7-15). Membahas lebih jauh tentang kemiskinan nelayan tradisional, Kusnadi (2008:19), mengemukakan bahwa kemiskinan nelayan terjadi karena sebab-sebab yang kompleks yang dapat dikategorikan menjadi sebab internal dan eksternal. Sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka, yang menyangkut masalah: a) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan; b) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; c) hubungan kerja (pemilik perahu nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh; d) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan; e) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut; f) gaya hidup yang dipandang “boros” sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

Sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan, yang menyangkut masalah: a) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial; b) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; c) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; d) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan; e)

penegakan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan; f) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca panen; g) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor nonperikanan yang tersedia di desa-desa nelayan; h) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; i) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal, dan manusia.

Strategi diversifikasi dalam rangka pemberdayaan nelayan tradisional pada dasarnya merupakan perluasan alternatif pilihan mata pencaharian. Strategi diversifikasi ini berkaitan erat dengan perubahan sikap dan proses persuasi. Sehubungan dengan sikap dan persuasi sejumlah teori telah dikemukakan oleh para ahli psikologi. Pada awal tahun 1970-an Dr. Martin Fishbein mengemukakan teori nilai harapan (*value-expectancy theory*). Sejak pertama kali dikemukakan pada awal tahun 1970-an, *value-expectancy theory* telah mengalami perkembangan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji keabsahan teori ini. Tidak mengherankan jika latar belakang teori ini adalah psikologi, karena teori ini dikemukakan oleh beberapa psikolog terkemuka, seperti Martin Fishbein, Icek Ajzen dan Philip Palmgreen. Teori ini memprediksi sikap manusia terhadap obyek dan tindakan. Teori ini sangat penting untuk mengetahui *expectancy* (harapan), *values* (nilai), *beliefs* (keyakinan), *attitude* (sikap), dan *gratification sought* (pencarian kepuasan).

Dalam penelitian tentang pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA), untuk meningkatkan kesejahteraan sosial nelayan tradisional, *value-expectancy theory* dijadikan landasan berpikir terutama untuk mengkaji sikap nelayan tradisional terhadap mata pencaharian alternatif. Penelitian ini mengasumsikan bahwa nelayan tradisional akan memiliki sikap menerima terhadap mata pencaharian alternatif apabila ia meyakini pekerjaan lain di luar pekerjaan mencari ikan dapat membawa ke tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik. Secara umum, tujuan

pengembangan mata pencaharian alternatif adalah perluasan kesempatan kerja dan berusaha dikalangan nelayan tradisional. Indikatornya adalah: 1. Berkembangnya usaha penangkapan ikan yang lebih produktif dan berwawasan lingkungan; 2. Berkembangnya usaha budi daya pantai dan laut; 3. Berkembangnya usaha pengelolaan pasca panen; 4. Berkembangnya wisata laut.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif-kualitatif yaitu penelitian dengan tujuan utama menggambarkan suatu masalah pada saat penelitian sedang dilakukan, melihat sebab-sebab dari masalah dan menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan masalah tersebut (Travers, 1978 dan Gay, 1976 dalam Consuelo G Savila, 1993:70).

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu memilih daerah/wilayah pesisir pantai yang sebagian besar penduduk bermata-pencaharian sebagai nelayan tradisional, dan merupakan salah satu dari 50 kabupaten tertinggal di Indonesia. Dalam hal ini dipakai *typical purposive*, karena ciri di atas merupakan ciri yang telah melekat pada daerah penelitian dalam waktu yang lama. Berdasarkan kriteria tersebut, dipilih Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lokasi penelitian.

Sumber data penelitian ini, yaitu informan yang dapat memberikan informasi secara langsung berkaitan dengan permasalahan nelayan tradisional yang ada di lokasi penelitian. Instansi/lembaga terkait meliputi Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, Aparat Kecamatan Arungkeke, Aparat Desa Arungkeke, tokoh masyarakat, lembaga sosial yang peduli terhadap nelayan. Sumber data primer adalah Kepala Keluarga (KK) nelayan tradisional, yang dalam hal ini ditentukan 30 orang Kepala Keluarga nelayan tradisional.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara dengan menggunakan panduan wawancara, studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang meliputi populasi nelayan tradisional, profil lokasi penelitian, potensi sumber daya yang tersedia serta dokumen-dokumen lain yang dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

Penelitian ini, menggunakan dua pendekatan analisis, yaitu :

1. Analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menganalisis tentang persepsi nelayan tradisional dan keluarga terhadap upaya penganekaragaman jenis mata pencaharian dan sikap nelayan tradisional dan keluarga terhadap upaya penyediaan mata pencaharian alternatif, serta kesejahteraan sosial nelayan tradisional. Dalam hal ini peneliti tidak menerima begitu saja segala informasi yang diberikan oleh sumber data, melainkan berupaya mengungkap kebenaran dengan memfokuskan diri pada menemukan permasalahan. Pendekatan fenomenologi dalam analisis data lebih condong ke *realistic phenomenology* yang menekankan pada pencarian secara universal mengenai persoalan nelayan tradisional yang meliputi tindakan, motif tindakannya dan nilai kepribadiannya (Salim, 2001).
2. Analisis korelasi dengan teknik korelasi *product moment* untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap mata pencaharian alternatif dan kesejahteraan sosial nelayan tradisional.

## D. Deskripsi Wilayah Penelitian

### 1. Kondisi Geografi

Desa Arungkeke merupakan salah satu dari enam desa di Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagai desa nelayan, Desa

Arungkeke terletak memanjang di pesisir pantai Laut Flores dengan panjang garis pantai lebih kurang 2 km<sup>2</sup>. Luas Desa Arungkeke adalah 3,09 km<sup>2</sup>, dengan pemanfaatan berupa sawahseluas 136 ha; tambak seluas 129 ha; tegalan seluas 23,25 ha; pemukiman dan pekarangan seluas 6,75 ha dan fasilitas umum (jalan, makam dan lain-lain) seluas 1,4 ha.

Wilayah Desa Arungkeke merupakan dataran rendah beriklim tropis dengan curah hujan sebanyak 2.980 mm, jumlah rata-rata hari hujan selama setahun sebanyak 19 hari.

### 2. Kondisi Demografi

Desa Arungkeke berpenduduk 4.114 jiwa, terdiri dari 2.000 orang laki-laki dan 2.114 orang perempuan. Ditinjau dari segi mata pencaharian penduduk, penduduk Desa Arungkeke yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 731 orang, nelayan 300 orang, petani tambak 121 orang, petani ternak 43 orang, pedagang 104 orang, angkutan 118 orang, dan jasa 59 orang.

### 3. Potensi Sumber Daya

#### a. Potensi Sumber Daya Alam

##### 1). Sumber Daya Perikanan

Tidak diperoleh data tentang potensi lestari perikanan yang telah dimanfaatkan dan belum dimanfaatkan. Di Desa Arungkeke terdapat 129 ha tambak, 121 orang petani tambak, dan 300 orang nelayan. Pada tahun 2009, produksi perikanan Desa Arungkeke disajikan dalam tabel 1 berikut ini,

Tabel 1. Produksi Perikanan Desa Arungkeke Tahun 2009

No.	Jenis Produksi	Jumlah (ton)
1.	Ikan Laut	1.016,7
2.	Rumput Laut	277,7
3.	Bandeng	98,84
4.	Udang windu	23,42

Sumber: Monografi Kecamatan Arungkeke Tahun 2009

## 2). Sumber Daya Pertanian

Kontribusi Desa Arungkeke dalam produksi pertanian dan perkebunan Kecamatan Arungkeke terbilang sangat kecil, hanya sekitar 2-3 % dari seluruh produksi pertanian dan perkebunan di Kecamatan Arungkeke. Tidak ada komoditi pertanian dan perkebunan yang menjadi andalan Desa Arungkeke padahal 166 ha (53,72 %) dari seluruh wilayah Desa Arungkeke adalah areal pertanian, dan 731 (17,77 %) dari seluruh penduduk Desa Arungkeke bermata pencaharian pokok sebagai petani. Produksi pertanian dan perkebunan Desa Arungkeke tahun 2009 dapat dibaca dalam tabel 2 berikut,

Tabel 2. Produksi Pertanian dan Perkebunan Desa Arungkeke

No.	Jenis Produksi	Jumlah (ton)
1.	Padi	627,5
2.	Jagung	162,0
3.	Ubi Kayu	4,5
4.	Bawang Merah	1,85
5.	Lombok	3,0
6.	Kelapa	40,0
7.	Kapas	61,0

Sumber: Monografi Kecamatan Arungkeke Tahun 2009

## 3). Pariwisata Pantai

Dari tujuh desa di Kecamatan Arungkeke, enam diantaranya merupakan desa pantai, namun untuk saat ini hanya Desa Arungkeke yang memiliki potensi pariwisata pantai yang cukup besar. Selain memiliki pantai yang indah dan bersih, Desa Arungkeke memiliki sarana dan prasarana wisata pantai yang memadai berupa dermaga kayu sepanjang 70 m yang dapat dijadikan tempat berlindung dari panas dan hujan serta dapat digunakan untuk memandangi keindahan pantai dari laut tanpa harus turun ke laut. Ada 144 unit rumah nelayan yang tertata rapi, tersedia prasarana transportasi dan komunikasi yang memadai.

## b. Potensi Sumber Daya Sosial

Dalam penelitian ini potensi sumber daya sosial diukur dengan melihat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Secara umum tingkat pendidikan penduduk Desa Arungkeke relatif rendah. Sebagian besar penduduk hanya berpendidikan SD. Akan tetapi saat ini hampir tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Bila dilihat dari pemilikan sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai dengan adanya dua TK, tiga SD, satu madrasah tsanawiyah dan satu madrasah aliyah.

Sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat di Desa Arungkeke adalah satu Puskesmas, enam posyandu, satu klinik KB, dan enam pos KB. Adapun tenaga kesehatan yang tersedia adalah seorang dokter umum, delapan orang perawat, dua orang bidan, tiga orang dukun bayi. Untuk ukuran sebuah desa, pemilikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan Desa Arungkeke tergolong cukup memadai.

## c. Potensi Sumber Daya Fisik

Sumber daya fisik merupakan faktor penunjang utama dalam pengembangan wilayah. Salah satu sumber daya fisik yang merupakan faktor penting yang dapat berfungsi menunjang pengembangan wilayah adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi. Jaringan transportasi jalan raya mulai dari Ibu Kota Kabupaten Jeneponto (Bontosungguh) sampai ke Desa Arungkeke, seluruhnya merupakan jalan aspal. Hal ini memberi harapan bagi pengembangan wilayah Desa Arungkeke, karena ketersediaan jaringan transportasi jalan raya yang cukup bagus memudahkan mobilitas manusia, barang, jasa dan modal.

Selain jaringan transportasi jalan raya, Desa Arungkeke memiliki sebuah pasar. Kemudian kepemilikan sarana komunikasi penduduk tersedia 120 sambungan telepon, 247 pesawat TV, dan 226 buah radio.

## **E. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Data Temuan Penelitian**

#### **a. Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA)**

##### **1) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto**

Penurunan produksi perikanan tangkap Kabupaten Jeneponto sejak tahun 2004 telah menggugah kesadaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan tingkat kesejahteraan nelayan tradisional. Kebijakan pengembangan mata pencaharian alternatif menjadi pilihan utama dalam penanganan masalah kesejahteraan nelayan tradisional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto bekerjasama dengan dinas-dinas terkait maupun lembaga-lembaga non pemerintah lainnya. Berbagai program pemberdayaan nelayan tradisional telah dilaksanakan, antara lain penyelenggaraan pelatihan berbagai jenis keterampilan kerja bagi nelayan tradisional dan keluarganya agar nelayan tradisional memiliki pilihan jenis mata pencaharian baik di bidang perikanan maupun di luar bidang perikanan. Akan tetapi sampai dengan tahun 2006, tidak tampak adanya perkembangan yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional Kabupaten Jeneponto pada umumnya dan nelayan tradisional Arungkeke pada khususnya.

Sampai dengan tahun 2006, secara umum keadaan pengelolaan laut dan perikanan Kabupaten Jeneponto tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hal ini ditandai dengan keadaan sebagai berikut,

- (a) Hasil tangkapan per unit usaha cenderung menurun akibat degradasi lingkungan yang disebabkan oleh praktik penangkapan ilegal dan bertambahnya uit penangkapan tanpa

dibarengi oleh ekspansi daerah penangkapan.

- (b) Kurang berkembangnya usaha budi daya pantai dan laut akibat kurangnya kemampuan teknis dan modal usaha
- (c) Kurang berkembangnya usaha pengelolaan panca panen
- (d) Tidak berkembangnya sektor pariwisata laut karena terbatasnya sarana dan prasarana. Padahal potensi wisata laut berupa ekowisata dan wisata untuk mancing yang tersedia cukup besar.

Dihadapkan pada kenyataan bahwa upaya pengembangan mata pencaharian alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional cenderung mengalami stagnasi, Pemerintah Daerah Kabupate Jeneponto mengambil kebijakan untuk memfokuskan program pengembangan mata pencaharian alternatif pada wilayah yang dipandang paling potensial. Untuk itu dipilih Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.

Di Desa Arungkeke terdapat dua Dusun yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, yaitu Dusun Lassang-Lassang dan Dusun Sicini. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto memfokuskan program Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif di dua Dusun tersebut. Dusun Lassang-Lassang untuk lokasi pengembangan budi daya rumput laut dan Dusun Sicini untuk lokasi pengembangan wisata pantai.

Untuk pengembangan wisata pantai di Desa Arungkeke, pada tahun anggaran 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto mengalokasikan dana APBD untuk pembangunan 40 unit rumah nelayan dan pembangunan dermaga kayu sepanjang 70 m di Dusun Sicini. Selanjutnya pada tahun anggaran 2008 dan 2009 dialokasikan dana APBD Kabupaten Jeneponto untuk pembangunan 104 unit untuk rumah nelayan, serta dana bantuan Bank Dunia untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang

wisata pantai berupa aspal, jalan beton, fasilitas MCK dan 144 unit sambungan listrik PLN. Untuk menunjang upaya pengembangan mata pencaharian alternatif, pada tahun anggaran 2011 direncanakan pembangunan lantai jemur rumput laut di Dusun Lassang-Lassang.

## 2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu utama bagi keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan masyarakat. Sebaik apapun suatu program pembangunan, apabila tanpa dukungan partisipasi masyarakat maka sulit diharapkan untuk mencapai hasil yang optimal. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan tidak tumbuh begitu saja melainkan melalui suatu proses mengikuti model teori nilai harapan (*value-expectancy theory*). Teori ini memprediksi sikap manusia terhadap obyek dan tindakan. Teori ini sangat penting untuk mengetahui *expectancy* (harapan), *value* (nilai), *beliefs* (keyakinan), *attitude* (sikap), dan *gratification sought* (pencarian kepuasan).

Seseorang akan berpartisipasi dalam suatu kegiatan apabila ia mengharapkan suatu nilai dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain, bahwa nelayan tradisional akan berpartisipasi dalam mata pencaharian di luar bidang perikanan apabila ia mengharapkan suatu nilai tambah dari mata pencaharian tersebut.

Secara umum nelayan tradisional di Desa Arungkeke, dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu,

(a) Nelayan yang mulai melaut pada pagi hari dan pulang pada siang hari (rata-rata 4-6 jam). Alat tangkap yang digunakan sangat sederhana, seperti perahu bermesin tempel ber-PK kecil (*katinting*: istilah lokal), pancing, dan jaring bentang berukuran kecil. Kelompok ini dikenal sebagai nelayan *Pape'kang* (pemancing). Jarak jelajah nelayan ini dalam mencari ikan hanya sekitar 1-3 mil dari pantai dengan organisasi

penangkapan terdiri dari 2-3 orang.

(b) Nelayan melaut pada malam hari (berangkat sore pulang pagi). Kelompok ini dikenal dengan nama *Parawe'*. Alat tangkap yang digunakan sedikit lebih maju dibanding dengan nelayan *pape'kang*, perahu yang digunakan berukuran lebih besar (*Jolloro'*: istilah lokal) bermesin 12 PK, organisasi penangkapan beranggota antara 5-6 orang. Hasil tangkapan berupa ikan palagis kecil, seperti, selar, lemuru, katamba, dan udang.

Sebagian besar nelayan tradisional dan nelayan buruh di Desa Arungkeke telah berpartisipasi dalam usaha budi daya rumput laut sebagai pekerjaan sampingan. Data tentang pekerjaan dan mata pencaharian nelayan tradisional secara langsung menjelaskan mengenai partisipasinya dalam mata pencaharian alternatif baik bidang perikanan maupun di luar perikanan, sebagaimana disajikan dalam tabel 3 berikut,

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Nelayan Tradisional (Kepala Keluarga) Menurut Mata Pencaharian Pokok dan Sampingan di Desa Arungkeke

No.	Jenis Mata Pencaharian	Pokok	Sampingan
1.	Nelayan	30	-
2.	Tani Rumput Laut	-	27
3.	Pertanian sawah/ladang	-	4
4.	Pertukangan	-	2
5.	Dagang	-	1
6.	Transportasi	-	2
	Jumlah	30	36

Sumber Data Hasil Wawancara Tahun 2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh nelayan tradisional sebagai kepala keluarga di Desa Arungkeke memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan sebagai nelayan, bahkan terdapat 6 orang (20 %) yang memiliki lebih dari satu pekerjaan sampingan. Hal ini menggambarkan bahwa nelayan tradisional di Desa Arungkeke tidak hanya sekedar bersikap positif terhadap mata pencaharian alternatif melainkan telah berpartisipasi dan berperan di

dalam mengembangkan mata pencaharian alternatif baik di bidang perikanan maupun di luar bidang perikanan.

#### **b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nelayan Tradisional**

Keterpurukan nelayan tradisional Desa Arungkeke mulai terasa pada tahun 2004. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pemilik kapal penangkap ikan yang meng-alihfungsikan kapalnya menjadi kapal pengangkut kayu dan banyaknya pemilik kapal yang menjual kapalnya kepada pengusaha perikanan dari daerah lain. Akibatnya, banyak nelayan tradisional dan nelayan buruh yang terpaksa menganggur. Sebagian besar nelayan tradisional dan nelayan buruh berada dalam kondisi yang sangat miskin, sehingga untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja terasa sulit.

Sebagian nelayan tradisional dan nelayan buruh Desa Arungkeke yang kehilangan mata pencaharian mulai melirik usaha budi daya rumput laut. Akan tetapi untuk menjadi petani rumput laut bukanlah tanpa hambatan. Dibutuhkan modal untuk memulai usaha budi daya rumput laut, padahal diketahui bahwa masalah utama yang dihadapi oleh nelayan tradisional dan nelayan buruh adalah tidak dimilikinya peralatan kerja seperti perahu serta terbatasnya akses ke lembaga-lembaga permodalan.

Seiring berjalannya usaha budi daya rumput laut di Desa Arungkeke, terbentuk suatu model pola hubungan baru antara nelayan pemilik perahu dengan nelayan buruh. Beberapa nelayan pemilik perahu bermesin tempel ber PK kecil memilih berhenti melaut dan menjalin kerjasama dengan nelayan buruh yang tidak memiliki alat tangkap. Pemilik perahu menyerahkan alat perahunya untuk digunakan oleh nelayan yang dengan sistem bagi hasil yang berbeda dengan sistem yang berlaku sebelumnya. Ikan hasil tangkapan dibagi rata antara pemilik perahu dengan nelayan buruh setelah dikeluarkan untuk biaya-biaya

operasional. Dari usaha mencari ikan nelayan *pape'kang* ini memperoleh penghasilan rata-rata antara Rp.10.000, s.d. Rp. 15.000,- per hari. Dalam kerjasama ini selanjutnya nelayan *pape'kang* dapat menggunakan perahu (*katinting*) untuk mengurus tanaman laut miliknya tanpa harus menyewa, dan sebagai imbalannya nelayan berkewajiban mengurus tanaman rumput laut kepunyaan pemilik perahu, dari mulai menanam, merawat sampai memanen.

Lain halnya dengan nelayan *parawe'* tetap menggunakan pola lama (pola *Juragan-sawi*), di mana pembagian hasil adalah 1:2, satu bagian untuk *juragan* (pemilik perahu) dan dua bagian untuk *sawi* (awak perahu). Kelompok nelayan *parawe'* ini memang tidak pernah benar-benar terpuruk karena mereka tidak pernah kehilangan mata pencaharian. Dari usaha mencari ikan, nelayan *parawe'* memperoleh penghasilan antara Rp. 30.000, s.d. Rp. 40.000,- per hari. Penghasilan tersebut belum termasuk penghasilan dari usaha budi daya rumput laut.

Dari pembahasan di atas jelas menunjukkan bahwa baik nelayan *pape'kang* maupun nelayan *parawe'* Desa Arungkeke, mengalami peningkatan pendapatan setelah berpartisipasi dalam mata pencaharian alternatif berupa usaha budi daya rumput laut. Dengan meningkatnya pendapatan nelayan maka akan semakin banyak kebutuhan dasar yang dapat dipenuhi.

Melalui wawancara terhadap 30 orang Kepala Keluarga nelayan tradisional Desa Arungkeke diperoleh data yang menunjukkan bahwa sejak melibatkan diri dalam mata pencaharian alternatif berupa usaha budi daya rumput laut, baik nelayan *pape'kang* maupun *parawe'* pada umumnya merasa telah mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta kebutuhan sosial berupa pemenuhan biaya pendidikan anak sampai setingkat SLTA dan pemenuhan biaya kesehatan.

### c. Pengaruh Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nelayan Tradisional

Penurunan produksi ikan Kabupaten Jeneponto pada tahun 2004 telah membawa pengaruh yang signifikan bagi kesejahteraan sebagian nelayan tradisional Desa Arungkeke. Banyak nelayan tradisional yang terkena PHK karena banyak pemilik kapal yang mengalihfungsikan kapalnya menjadi kapal pengangkut kayu atau menjual kapalnya kepada pengusaha perikanan di daerah lain. Sebagai solusi atas banyaknya nelayan buruh yang kehilangan mata pencaharian. Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mencanangkan program pengembangan mata pencaharian alternatif. Program tersebut disambut baik oleh sebagian nelayan Desa Arungkeke terutama nelayan buruh yang memang sudah kehilangan mata pencaharian.

Usaha budi daya rumput laut bagi sebagian nelayan Desa Arungkeke pada awalnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga sulit bagi nelayan pembudidaya rumput laut untuk mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal. Hal ini mendorong sebagian besar nelayan untuk kembali mencari ikan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak perlu lagi berhutang, dan hasil panen rumput laut setiap 45 hari dapat digunakan untuk memperbesar modal usaha.

Upaya pengembangan mata pencaharian alternatif yang dilaksanakan secara lebih intensif di Desa Arungkeke pada tahun 2006, dan kenyataan yang menunjukkan bahwa usaha budi daya rumput laut cukup menjanjikan untuk peningkatan kesejahteraan, mendorong sebagian nelayan untuk ikut melakukan usaha budidaya rumput laut. Dengan demikian sebagian besar nelayan tradisional Desa Arungkeke, baik nelayan *pape'kang* maupun nelayan *parawe'* telah menjadikan usaha budi daya rumput laut sebagai pekerjaan sampingan.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengembangan mata pencaharian alternatif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial nelayan tradisional Desa Arungkeke, dilakukan uji statistik dengan teknik korelasi *product moment*. Hasil analisis korelasi *product moment* untuk mengetahui pengaruh variabel bebas pengembangan mata pencaharian alternatif (X) terhadap variabel terikat (Y) kesejahteraan sosial nelayan tradisional menghasilkan angka korelasi 0,850 dan angka probabilitas 0,000. Karena angka probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah variabel bebas (X) pengembangan mata pencaharian alternatif berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) kesejahteraan sosial nelayan tradisional dan signifikan pada taraf signifikansi 95 %.

## 2. Analisis Teoretis Atas Temuan Penelitian

Kebijakan pemerintah dengan istilah revolusi biru tentang motorisasi perahu dan modernisasi alat tangkap, diharapkan akan meningkatkan hasil tangkapan sehingga pendapatan nelayan semakin meningkat. Akan tetapi di sisi lain kebijakan tersebut hanya dapat dinikmati dan dirasakan oleh sebagian kecil nelayan yaitu kelompok nelayan yang memiliki modal besar, memiliki alat-alat tangkap modern dan kemampuan kapal jelajah yang dimiliki dapat mencapai hingga ke lepas pantai (*off shore*). Dalam kenyataannya populasi terbesar nelayan adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh, mereka memiliki kemampuan peralatan tangkap dan modal usaha yang sangat terbatas, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat nelayan tersebut hanya dirasakan oleh sebagian kecil nelayan (nelayan bermodal besar).

Selain kebijakan yang belum dirasakan manfaatnya oleh nelayan tradisional faktor penyebab lainnya, adalah kondisi alam dan irama musim yang sulit ditebak, ketinggalan teknologi alat tangkap, kekurangan modal,

tingkat pendidikan yang rendah, dan semua itu menjadikan nelayan semakin sulit dalam menjalani kehidupan.

Nelayan tetap hidup dalam ketidakberdayaan dan keterbatasan ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Keterbatasan tersebut terwujud pada ketidakmampuan nelayan ikut ambil bagian di dalam ekonomi pasar yang dapat menguntungkan bagi dirinya, tidak dilibatkannya dalam pengambilan keputusan meskipun semua itu untuk kepentingan mereka sendiri. Demikian juga kebijakan tentang pengkaplingan wilayah perairan yang dilakukan oleh pengusaha perikanan yang berskala besar, yang tentunya kebijakan tersebut tidak bisa melindungi hak-hak nelayan lokal yang memiliki banyak keterbatasan.

Program pemberdayaan nelayan miskin, memberi penekanan pada partisipasi seluruh masyarakat dalam kegiatan pengentasan kemiskinan, termasuk di dalamnya partisipasi dari rakyat miskin itu sendiri. Mengacu pada teori *value-expectancy theory*, partisipasi muncul apabila ada harapan yang lebih baik dari dari program yang dilaksanakan. Tingginya partisipasi nelayan tradisional dalam program pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA) didorong oleh besarnya nilai harapan terhadap MPA baik di bidang perikanan maupun di luar perikanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional.

Program pengentasan kemiskinan harus bersifat partisipatif, dalam arti membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat miskin untuk membantu dirinya sendiri keluar dari keadaan kemiskinan yang dialami. Pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA), yang bertujuan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha di kalangan nelayan tradisional, hanya akan berhasil apabila didukung oleh partisipasi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengembangan mata pencaharian alternatif, partisipasi *self-*

*mobilization* (partisipasi mandiri), di mana masyarakat berpartisipasi dengan jalan mengambil inisiatif secara independen untuk merubah sistem.

Di tengah ketidakpastian akan nasib nelayan yang hanya mengandalkan bidang perikanan saja, pengembangan mata pencaharian alternatif di luar bidang perikanan merupakan salah satu alternatif bagi nelayan tradisional dan buruh nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Secara umum, tujuan pengembangan mata pencaharian alternatif memberikan perluasan kesempatan kerja dan berusaha di kalangan nelayan tradisional. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha diharapkan akan lebih berkembangnya usaha penangkapan ikan yang lebih produktif dan berwawasan lingkungan; berkembangnya usaha budi daya pantai dan laut; berkembangnya usaha pengelolaan pasca panen; dan berkembangnya wisata laut.

Berbagai keterbatasan dan ketidakberdayaan, tidak serta merta menjadikan nelayan tidak memiliki kemauan untuk merubah nasib agar lebih baik. Nelayan tradisional di Desa Arungkeke yang terikat oleh kebudayaan Bugis-Makassar yang cenderung ekspresif dan lebih terbuka serta memiliki keberanian menantang alam, kegigihan dan ketangguhan dalam bekerja. Nilai-nilai tersebut telah diwarisi dari orangtua bahkan dari nenek moyang mereka. Hal ini dibuktikan ketika pada tahun 2004 nelayan di Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan produksi sumber daya ikan (SDI), mereka bangkit untuk memilih alternatif pekerjaan lain di luar bidang perikanan yaitu mulai dikembangkan budi daya rumput laut. Meskipun baru dalam tataran budi daya belum sampai ke proses pengolahan rumput laut, akan tetapi peningkatan pendapatan nelayan mulai dirasakan oleh sebagian besar nelayan di Desa Arungkeke.

Upaya pengembangan mata pencaharian alternatif yang dilaksanakan secara lebih

intensif di Desa Arungkeke yang berupa budi daya rumput laut dalam kenyataan menunjukkan bahwa usaha budi daya tersebut cukup menjanjikan untuk peningkatan kesejahteraan, dan mendorong sebagian nelayan untuk ikut melakukan usaha budidaya rumput laut. Hal ini dibuktikan oleh sebagian besar nelayan tradisional Desa Arungkeke, baik nelayan *pape'kang* maupun nelayan *parawe'* yang telah menjadikan usaha budi daya rumput laut sebagai pekerjaan sampingan. Setelah nelayan memiliki mata pencaharian alternatif berupa usaha budi daya rumput laut, baik nelayan *pape'kang* maupun *parawe'* pada umumnya merasa telah mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pengembangan mata pencaharian alternatif di Desa Arungkeke akan dapat diperluas lagi setelah tersedianya berbagai sarana dan prasarana jalan, unit rumah bagi nelayan miskin, dermaga kayu, MCK, listrik yang dapat dikembangkan menjadi wisata pantai dan lebih berkembangnya usaha budi daya pantai dan laut, serta pembuatan lantai jemur rumput laut untuk meningkatkan kualitas rumput laut agar harga jual rumput laut menjadi lebih tinggi.

Tentunya apabila Desa Arungkeke dapat dikembangkan sebagai daerah wisata pantai, akan membuka peluang dan menarik investor untuk mendorong dinamika pembangunan kawasan pesisir pantai Kecamatan Arungkeke. Dengan semakin berkembangnya kawasan tersebut akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional khususnya Desa Arungkeke dan Kabupaten Jeneponto pada umumnya.

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan dan direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Nelayan tradisional Desa Arungkeke dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, nelayan *pape'kang*, nelayan yang melaut pada pagi hari dan melakukan aktivitas mencari ikan antara 4-6 jam per hari; nelayan dan *parawe'*, nelayan yang melaut mulai sore hari dan pulang pada pagi hari, melakukan aktivitas menangkap ikan antara 12-14 jam per hari.
- b. Upaya pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan tradisional di Kabupaten Jeneponto telah dilaksanakan sejak tahun 2004, yaitu sejak menurunnya produksi perikanan Kabupaten Jeneponto dan dilaksanakan secara lebih intensif di Desa Arungkeke sejak tahun 2006.
- c. Karena mempunyai waktu luang yang lebih banyak, nelayan *pape'kang* yang pada umumnya merupakan korban PHK akibat banyaknya pemilik kapal penangkap ikan mengalihfungsikan atau menjual kapalnya, nelayan *pape'kang* lebih dulu berpartisipasi dalam mata pencaharian alternatif khusus usaha budi daya rumput laut. Nelayan *parawe'* berpartisipasi dalam usaha budi daya rumput laut sejak dilaksanakannya upaya pengembangan mata pencaharian alternatif secara intensif di Desa Arungkeke pada tahun 2006.
- d. Partisipasi nelayan dalam upaya pengembangan mata pencaharian alternatif khususnya usaha budi daya rumput laut berkorelasi positif dengan meningkatnya kesejahteraan sosial nelayan tradisional Desa Arungkeke, baik bagi nelayan *pape'kang* maupun nelayan *parawe'*. Analisis statistik dengan teknik korelasi *product moment* menghasilkan angka korelasi 0,850 dan angka probabilitas 0,000. Artinya, pengembangan mata pencaharian alternatif berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial nelayan tradisional Desa Arungkeke.
- e. Sesuai dengan *value-expectancy theory*

(teori nilai harapan), partisipasi muncul apabila ada harapan yang cukup dari program yang dilaksanakan. Tingginya partisipasi nelayan tradisional dalam program pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA) didorong oleh besarnya harapan bahwa MPA akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan tradisional.

## 2. Rekomendasi

Dari kesimpulan tersebut, diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut,

- a. Oleh karena pada umumnya nelayan Desa Arungkeke belum pernah bekerja di luar bidang perikanan, partisipasi mereka dalam mata pencaharian alternatif (MPA) pada dasarnya dilandasi dengan menurunnya pendapatan dari perikanan dengan harapan ke depan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu diperlukan penelitian lebih jauh tentang efektivitas pengembangan mata pencaharian alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial nelayan tradisional.
- b. Pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA) dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial nelayan tradisional seyogyanya tidak sepenuhnya menarik nelayan dari bidang perikanan dan kelautan.
- c. Diperlukan pengembangan ketrampilan dan keahlian di bidang budidaya perikanan dan budidaya rumput laut yang meliputi metode dan strategi manajemen budidaya tersebut sehingga produk perikanan dan rumput laut yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk lainnya.
- d. Dukungan dan konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto sangat dibutuhkan untuk pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Arungkeke yaitu Desa Lassang-Lassang dan Desa Sicini agar potensi sumber daya baik perikanan, rumput laut dan sumber daya yang lainnya dapat dimanfaatkan secara

maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kebijakan pengembangan kawasan tersebut dengan telah tersedianya berbagai sarana jalan, perumahan nelayan, fasilitas dermaga kayu, fasilitas umum untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan memperluas kesempatan kerja sehingga akan menarik minat para investor untuk mendorong pembangunan di kawasan pesisir di Kecamatan Arungkeke.

- e. Bagi Instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, instansi yang lain serta lembaga sosial yang ada di daerah yang *concern* pada masyarakat nelayan hendaknya memiliki komitmen yang sama untuk menjalin kemitraan antar instansi, lembaga sosial dalam upaya membantu masyarakat nelayan keluar dari belenggu kemiskinan dengan membuat kebijakan yang lebih bisa memahami karakteristik masyarakat nelayan yang sangat berbeda dengan masyarakat lainnya. Program pemberdayaan masyarakat nelayan seharusnya bisa menjadi suatu kegiatan pengembangan yang lebih mengarah pada kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat nelayan, dan mereka dilatih untuk bisa mencari alternatif pemecahan sendiri, agar mereka tetap dapat survive dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Tugas pemerintah serta pihak lain adalah membantu agar alternatif pemecahan tersebut bisa dilaksanakan di samping memberikan alternatif pilihan lainnya yang selama ini belum dilakukan oleh masyarakat nelayan.

\*\*\*

## **BIBLIOGRAFI**

- Avenroza, Ahmad dkk, 2007, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Abidin, A.Z, 2002, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Yogyakarta.
- Andi Adri Arief, Modernisasi Perikanan: Apa Yang Terjadi? (<http://www.scribd.com/doc/14684717/Modernisasi-Perikanan>, tanggal 16/10/2010).
- Consuelo G. Sevilla, dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta.
- DKP dan BPN kerjasama Pengembangan Usaha Ekonomi bagi Nelayan, *Data Penduduk Miskin Indonesia*, Departemen Komunikasi dan Informatika RI.
- Fishbein, M & Azjen, I,1975, *Belief, Attitude, Intention and Behavior : An Introduction to Theory and Research*, Addison-Wiley Publising Company, Massachusetts.
- Pretty, Jules, N, 1995. “*Participatory Learning for Sustainable Agriculture*”, Sustainable Agriculture Programme, International Institute for Environment and Development, 3 Endsleigh Street, London.
- Kecamatan Arungkeke Dalam Angka Tahun 2009*. Koordinator Statistik Kecamatan Arungkeke dan BPS Kabupaten Jeneponto.
- Kusnadi, 2008, *Akar Kemiskinan Nelayan*, LKiS, Yogyakarta.
- Salim, Agus, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (dari Denzin Guba dan Penerapannya), Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong,1996, *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.